

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Pelaksanaan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah berbasis Bank Sampah dan Potensi Nilai Ekonomis Di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung*”.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dibuat dengan harapan mewujudkan daerah kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian hidup, meningkatkan Kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan memelihara estetika serta kenyamanan kota yang bersih dan sehat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Oleh karena itu adanya keperdulian pemerintah dalam pengelolaan sampah dibuatlah sebuah peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang berkerja sama dengan berbagai lembaga atau instansi pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, seperti bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota bandung, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD), dan Unsur Pelaksanaan Teknis (UPT). Dalam upaya pengelolaan serta penanganan sampah dibuatlah sebuah program bernama kang pisman (Kurangi, Pisahkan dan manfaatkan) untuk menyukseskan program tersebut pemerintah juga membuat program Bank Sampah yakni untuk mengsukseskan program Kangpisman tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui: 1). Tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah. 2).Mengklasiasn sampah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah No.9 tahun 2018. 3). Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif, metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empiris kepada masyarakat, sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Desa Babakansari dan Bank Sampah, serta dalam Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan, observasi dan dokumen.

Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi hukum serta teori tanggung jawab negara, Teori Umum Tentang Pengelolaan Sampah Bebas Bank Sampah dan teori siyasa dusturiyah. Implementasi hukum merupakan sebagai pelaksanaan atau penerapan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk dilihat efektifitas dari sebuah produk hukum yang telah dibuat. Teori tersebut peneliti gunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta kesesuaian dengan pembahasan penelitian yang peneliti buat.

Hasil dari penelitian ini ditemukan: 1). sebagai tanggung jawab negara melalui Peraturan daerah Pemerintah berkerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD), dan Unsur Pelaksanaan Teknis (UPT). dalam melakukan peningkatan pengelolaan sampah dengan dibuat Program Kangpisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) untuk menyukseskan program tersebut pemerintah membuat program Bank Sampah dalam meningkatkan pengelolaan sampah serta meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. 2).Salah satu tanggung jawab negara dibuatlah sebah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningaktkan Pengelolaan sampah serta mengklasifikasikan sampah agar berdampak potensi nilai ekonomi. . 3). Berdasarkan tinjauan siyasa dusturiyah perarturan yang dibuat diorientasikan dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat, sehingga apabila kebijakan ini ditinjau dari siyasa dusturiyah dilihat dari kaidah dan prinsipnya dapat dikatakan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan sampah ini sudah sesuai dengan siyasa dusturiyah hanya saja masih belum optimal.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengelolaan dan Bank Sampah